



Dana PHR Diduga

Salah Sasaran

Miliaran, Ada yang Dipakai Beli Mobil

MANGUPURA - Komisi III DPRD Badung yang mengawasi masalah keuangan menduga ada yang tidak beres dengan penggunaan dana bantuan keuangan Pemkab Badung kepada enam kabupaten, yang bersumber dari penyisihan pajak hotel dan restoran (PHR). Pasalnya, ada beberapa kabupaten yang membelanjakan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya. Misalnya kabupaten Buleleng malah menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli mobil operasional.

Padahal, komitmen awal penggunaan dana tersebut untuk

membantu dan mengembangkan pariwisata. Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria mengatakan, penggunaan bantuan penyisihan PHR dari Badung dan Denpasar semuanya telah diatur dalam SK Gubernur. Yakni SK Gubernur Bali No. 286/01-F/HK/2009, tertanggal 11 Maret 2009. Disebutkan, penggunaan dana untuk Pemprov Bali dialokasikan untuk promosi pariwisata, sedangkan untuk enam kabupaten untuk peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur di obyek wisata.

Namun, dari laporan penggunaan anggaran tahun 2014, Satria melihat banyak yang melenceng. Dana yang digunakan untuk pengembangan pariwisata hanya sedikit. "Semoga nanti

tidak menjadi temuan BPK, karena ada ketidaksesuaian antara komitmen awal, dengan realisasi dilapangan," sindir Satria kemarin (22/3).

Dijelaskan lebih jauh, berdasar laporan penggunaan realokasi penerimaan PHR dari Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar tahun anggaran 2014, dari Pemprov Bali dan enam kabupaten, yang diterima Komisi III DPRD Badung, setidaknya total Rp 207 miliar lebih anggaran yang dibagi-bagikan. Pemprov Bali sebagai koordinator mendapatkan bagian Rp 34,5 miliar lebih.

Kemudian disusul kabupaten Buleleng mendapat jatah terbesar yaitu Rp 50 miliar lebih, menyusul Karangasem sebesar Rp 36,4 miliar lebih, Tabanan

kebagian Rp 25,7 miliar lebih, Jembrana mendapatkan sebesar Rp 21,6 miliar lebih, Klungkung Rp 21,3 miliar lebih dan bagian terkecil diterima Kabupaten Bangli sebesar Rp 17,2 miliar lebih.

"Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, tiap penerima bantuan juga menjabarkan penggunaan dana yang diterima," imbuhnya. Misalkan untuk Pemprov Bali ada 11 SKPD yang menerima aliran dana tersebut.

Begitupula dengan kabupaten lain, sangat sedikit alokasi untuk sarana dan prasarana pariwisata. Satria melihat secara umum realokasi dana tersebut telah melenceng dari komitmen awal.

Nah, untuk pengadaan mobil ini tercantum dalam laporan Kabupaten Buleleng. Dimana

sebagian anggaran digunakan untuk pengadaan mobil operasional sebesar Rp 565,6 juta. Ada juga pengadaan perlengkapan kantor, meubeler hingga pakaian dinas untuk kegiatan tertentu senilai Rp 208,1 juta. Karangasem mengalirkan dana tersebut sebagian besar ke RSUD Karangasem dengan nilai Rp 14,1 miliar lebih. Tabanan juga mengalokasikan terbesar untuk dinas PU sebesar Rp 14,8 miliar lebih, sedangkan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya Rp 2 miliar. "Kalau memang ada keinginan Pemprov Bali mengarahkan anggaran tersebut untuk kegiatan lain, diluar komitmen awal harusnya ada perubahan kesepakatan," tukas Satria. (**san/han**)

Edisi : Senin, 23 Maret 2015

Hal : 24